



PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILKADA : STUDI VOTER TURNOUT MASYARAKAT KOTA TEBING TINGGI DALAM PILKADA 2017 DENGAN CALON TUNGGAL

Muhammad Saleh, Yuslim, Bakaruddin Rosyidi

Magister Tata Kelola Pemilu, Fisip, Universitas Andalas

Abstrak

Partisipasi memilih menjadi salah satu kebutuhan agar keberlanjutan demokrasi dan sistem politik tidak mengalami hambatan. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi merupakan salah satu kunci yang menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandat kepada seseorang sebagai wakil rakyat atau sebagai penguasa yang akan duduk dalam pemerintahan. Oleh karena itu, sebagian negara-negara yang menganut demokrasi, termasuk Indonesia, menjadikan partisipasi sebagai salah satu agenda yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses pemilu khususnya dalam hal hadir atau tidaknya warga negara untuk memilih (voter turnout).

Salah satu fenomena yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah sejak tahun 2015 yang lalu adalah munculnya pasangan calon tunggal dalam pemilihan. Undang undang juga telah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal tersebut. Kota Tebingtinggi di Provinsi Sumatera Utara termasuk salah satu dari Kabupaten/Kota yang memiliki pasangan dengan calon tunggal di Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2017 yang lalu. Berdasarkan data, partisipasi pemilih dalam pilkada Kota Tebing Tinggi dengan calon tunggal menunjukkan angka yang tidak terlalu tinggi, yaitu sebesar 59.868 suara (55,8 %). Sedangkan masyarakat Kota Tebing Tinggi yang memilih Walikota Incumbent 41.937 suara (70,04%), yang memilih kotak kosong sebesar 16.861 suara (28,16%) dan masyarakat yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 47.943 suara (44,46%). Alasan masyarakat yang memilih Walikota Incumbent antara lain popularitas calon yang tinggi, memiliki kinerja yang baik, adanya hubungan kekerabatan dan lainnya. Sedangkan yang memilih kotak kosong memiliki alasan tidak suka dengan calon Walikota, tidak diberi uang dan adanya ajakan dari etnis tertentu untuk memilih kotak kosong.

Kata Kunci: Pemilihan Umum Kepala Daerah, Calon Tunggal dan Partisipasi Pemilih.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan. Keberhasilan pemilu tentunya sangat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik warganegara yang bersangkutan. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warganegara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses Pemilu.

Partisipasi pemilih merujuk pada kehadiran warga negara yang memiliki hak untuk memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam penyelenggaraan pemilu di banyak negara, partisipasi pemilih sering menjadi isu bersama karena berkaitan dengan seberapa banyak warga negara hadir untuk memberikan suara mereka di tempat pemberian suara. Dalam sejarah pemilu di Indonesia, partisipasi pemilih tidak jarang dimaknai sebagai salah satu indikator keberhasilan pemilu. Pemilu yang memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dianggap memiliki legitimasi yang tidak diragukan.

Awalnya, Pemilihan Kepala Daerah serentak yang diwacanakan selama ini sempat membuat polemik karena di beberapa wilayah hanya terdapat satu pasang calon kepala daerah, atau calon tunggal. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memperbolehkan pemilihan kepala daerah bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Mahkamah

Konstitusi beralasan, jika Pilkada ditunda karena kurangnya calon, maka akan menghapus hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2017 Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara juga diikuti oleh calon tunggal. Pasangan Walikota petahana, Umar Zunaidi Hasibuan dan Oki Doni Siregar diusung oleh 8 (delapan) partai politik, yaitu Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura, PDI Perjuangan, PPP, PKB dan Partai NasDem. Koalisi besar ini mengantongi sebanyak 19 kursi dari 25 Kursi yang ada di DPRD Kota Tebingtinggi. Sedangkan sisa 6 kursi lagi yang dimiliki PKS (2 Kursi), PAN (1 Kursi), PBB (1 Kursi) dan PKPI (2 Kursi), sudah cukup untuk mengusung satu pasangan calon. Pasalnya, batas minimal dukungan pasangan calon hanya 20 persen atau 5 kursi di DPRD. Tidak adanya calon pesaing dalam Pilkada Kota Tebing Tinggi tahun 2017 pada masa pendaftaran awal membuat KPU Kota Tebing Tinggi memperpanjang masa pendaftaran selama tiga hari (21-23 September 2016) untuk membuka kesempatan bagi parpol lainnya untuk mengusung calon Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi. Sisa 6 (enam) kursi di DPRD diharapkan memberi peluang bagi parpol untuk berkoalisi dalam mengusung calon (termasuk PKPI, walaupun akhirnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena faktor dualisme kepengurusan).

Prof. Sakah Saidu Mahmud membagi kedalam 4 (empat) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih (voter turnout) dalam Pemilihan Kepala Daerah, yaitu faktor sosial ekonomi, faktor geografis, faktor psikologis dan faktor rasional. Partisipasi pemilih (voter turnout) yang dimaksud adalah prosentase pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih. Pemilih menggunakan hak

suaranya meski suaranya tidak sah. Perhitungan diperoleh dari jumlah pemilih yang menggunakan haknya dibagi dengan jumlah pemilih terdaftar. Bentuk partisipasi politik yang paling mudah diukur intensitasnya adalah persentase orang yang menggunakan hak pilih pada saat pemilu (voter turnout) dibanding dengan jumlah seluruh warga negara yang berhak memilih. Persoalan yang ada saat ini adalah jika dihitung secara rata-rata partisipasi pemilih di Indonesia terus mengalami penurunan konsisten sebesar sepuluh persen dari tiga periode pemilu sejak pemilihan umum demokratis pertama kali diselenggarakan di Indonesia pasca-runtuhnya rezim Orde Baru (KPU Kabupaten Tasikmalaya 2015 : 4).

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memilih atau tidak memilih secara garis besar dibedakan atas 4 bagian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Sakah Saidu Mahmud yaitu faktor Geografis menyangkut masalah kondisi cuaca dan jarak wilayah pemilih dengan lokasi pemilihan/TPS dan perbedaan wilayah pada saat pemilihan. Faktor sosial ekonomi menyangkut masalah pendidikan, latar belakang sosial maupun keadaan ekonomi pemilih, pekerjaan dan pendapatan, suku/ras dan money politic. Faktor Psikologis menyangkut masalah ciri kepribadian seseorang atau kedekatan kepribadian seseorang terhadap calon atau kandidat, sosialisasi dan popularitas/kinerja calon. Selanjutnya faktor rasional menyangkut rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihan berdasarkan untung dan rugi serta pertimbangan-pertimbangan yang matang seperti jenis pemilu yang diikuti, ideologi partai politik pengusung dan kesadaran berdemokrasi (motivasi voting). Seluruh faktor diatas akan saling mempengaruhi dan mengambil peran dalam diri seseorang sebelum akhirnya

orang itu memutuskan untuk memilih atau tidak memilih.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, guna memperoleh gambaran yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah Tebing Tinggi Tahun 2017. Lokasi penelitian di Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Data dan informasi penelitian diperoleh dari keterangan informan, pengamatan serta dokumen yang relevan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara yang mendalam dengan informan, studi dokumentasi dan pengamatan langsung dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keikutsertaan masyarakat dalam proses Pemilihan Kepala Daerah tidak terlepas dari adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih, antara lain :

Faktor sosial ekonomi

Faktor sosial ekonomi bisa jadi merupakan penentu utama mengapa partisipasi masyarakat di Kota Tebing Tinggi tidak konsisten, hal ini terjadi ketika demokrasi yang dilaksanakan selama ini tidak berbanding lurus dengan kemakmuran masyarakat, ketika demokrasi dibuka lebar-lebar ternyata tidak membawa dampak yang positif terhadap masyarakat, maka yang terjadi adalah masyarakat lebih memilih untuk bekerja daripada datang ke TPS untuk memilih. Status sosial pemilih juga menentukan seorang untuk menjatuhkan pilihan dalam sebuah pemilihan. Hal ini disebabkan status sosial seseorang akan menentukan pilihan apakah pemilih tersebut adalah orang terpandang ataukah seseorang yang mempunyai ekonomi yang baik atau juga sebaliknya.

Dalam faktor sosial ekonomi, terdapat pula bagian-bagian lainnya yang turut serta mempengaruhi partisipasi pemilih, yaitu : faktor pendidikan, pekerjaan/pendapatan, faktor etnis/ras dan faktor money politic. Dari hasil penelitian dilapangan, diketahui bahwa Partisipasi pemilih atau jumlah pemilih (voter turnout) secara sederhana berarti persentase atau populasi usia pemilihan (atau persentase pemilih yang terdaftar) yang benar-benar hadir untuk memilih dalam pemilu. Penghitungan diperoleh dari jumlah pemilih yang menggunakan haknya dibagi dengan jumlah pemilih terdaftar. Dalam masyarakat demokratis, partisipasi pemilih (voter turnout) adalah bentuk paling umum dari partisipasi politik. Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tebing Tinggi tahun 2017 hanya mencapai 55,8%.

Dalam poin sosial ekonomi ini terdapat tiga elemen yang mempengaruhi seperti pendidikan, pekerjaan/pendapatan, etnis/ras dan money politic. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat yang bekerja pada sektor formal cenderung menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada, sedangkan masyarakat yang bekerja pada sektor non-formal lebih memprioritaskan bekerja untuk mendapatkan uang daripada harus pergi ke TPS dan menggunakan hak pilih. Faktor etnis juga berperan karena berdasarkan hasil temuan dilapangan, ada kalangan etnis tionghoa yang mengajak komunitasnya untuk memilih kotak kosong/kolom kosong. Terkait faktor money politic, temuan yang didapatkan agak unik karena pemilih memilih kotak kosong karena tim sukses Walikota Incumbent tidak memberikan uang kepada pemilih yang masuk sebagai informan dalam penelitian ini.

Faktor Geografis

Yang berkaitan dengan faktor geografis adalah cuaca pada saat hari pemungutan suara, jarak TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan perbedaan wilayah. Masyarakat menyebutkan bahwa faktor cuaca maupun jarak TPS tidak berpengaruh terhadap partisipasi mereka dalam Pilkada.

Faktor Psikologis

Terdapat tiga unsur yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi, yaitu faktor kedekatan terhadap pasangan calon, sosialisasi yang dilakukan oleh pasangan calon dan KPU Kota Tebing Tinggi serta popularitas/kinerja calon. Kedekatan terhadap calon dan popularitas calon serta kinerja calon merupakan faktor yang sangat dominan bagi pemilih untuk memilih calon. Masyarakat menyatakan bahwa Walikota Incumbent memiliki kinerja yang baik dalam memimpin Kota Tebing Tinggi sehingga memberikan pilihan kepada Walikota tersebut. Selain itu, faktor kekerabatan dengan Walikota Incumbent juga mempengaruhi pemilih. Sedangkan sosialisasi yang dilakukan oleh calon tunggal tidak terlalu banyak karena mereka yakin akan memenangkan Pemilihan Kepala Daerah. Sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara (KPU Kota Tebing Tinggi) lebih intensif dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat agar datang ke TPS (tempat pemungutan suara) dan menggunakan hak pilihnya.

Faktor Rasional.

Dalam penelitian yang dilakukan, faktor rasional mencakup tentang jenis pemilu yang diikuti, ideologi dari gabungan partai politik pendukung pasangan calon dan kesadaran berdemokrasi (motivasi voting). Pendapat beragam ditemukan di lapangan. Masyarakat sepakat bahwa mereka menggunakan hak pilih karena

melihat sosok calon Walikota secara personal tanpa melihat partai pengusung calon Walikota tersebut. Dan pendapat beragam ditemukan terkait kesadaran berdemokrasi (motivasi voting). Sebagian masyarakat menyatakan bahwa memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah itu penting bagi Demokrasi di Indonesia. Masyarakat lainnya menyatakan bahwa mereka lebih mengutamakan bekerja untuk mendapatkan uang pada saat hari pemungutan suara. Sedangkan faktor jenis pemilu juga memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pemilihan umum.

Tabel 3.1 Angka Partisipasi Pemilih Berdasarkan Jenis Pemilu

No	Jenis Pemilihan Umum	Tahun	Angka Partisipasi (%)
1.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara	2013	51,1 %
2.	Pemilihan Umum Legislatif	2014	75,4 %
3.	Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	2014	53,7 %
4.	Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi	2017	55,8 %

Sumber : Diolah dari PPID KPU Kota Tebing Tinggi Tahun 2018.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah partisipasi pemilih dalam setiap Pemilu berbeda-beda. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 tingkat partisipasi pemilih hanya 51,1%. Angka persentase partisipasi pemilih meningkat cukup signifikan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 sebesar 75,4%. Namun turun lagi dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di 53,7%. Sedangkan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 yang lalu, persentase pemilih yang menggunakan hak pilih

sebesar 55,8%. Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat pemilih yang menggunakan hak pilih berbeda-beda dalam melihat jenis pemilihan. Di Kota Tebing Tinggi, masyarakat pemilih lebih antusias terhadap pemilihan umum legislatif (Pileg) dibanding jenis pemilihan lainnya.

SIMPULAN

Dalam menggambarkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal di Kota Tebing Tinggi Tahun 2017, sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan menggambarkan partisipasi pemilih dengan lebih dari 1 (satu) pasangan calon. Yang menarik perhatian, bahwa Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal merupakan hal yang pertama sekali terjadi di Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kota Tebing Tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Pertama, faktor sosial dan ekonomi. Dalam faktor ini, tingkat pendidikan sangat berperan. Masyarakat yang bekerja di bidang formal (seperti PNS) lebih peduli terhadap demokrasi di Indonesia sehingga mereka sadar untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah. Sedangkan masyarakat yang bekerja pada sektor non-formal (seperti sopir angkot dan buruh bangunan) umumnya tidak terlalu peduli terhadap proses pemilihan umum dan mereka lebih memilih untuk bekerja dan mendapatkan uang dari pada membuang waktu untuk pergi ke TPS (tempat pemungutan suara). Faktor etnis juga berperan dalam partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Di Kota Tebing Tinggi, politik identitas coba diangkat oleh etnis keturunan tionghoa dengan mengajak kelompoknya untuk menggunakan hak pilih dengan memilih kotak kosong.

Sedangkan faktor politik uang tidak terlalu terlihat karena hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon dalam pesta demokrasi di Kota Tebing Tinggi.

Kedua, Faktor Geografis. Faktor yang dimaksud adalah cuaca pada saat hari pemilihan, jarak ke TPS (tempat pemungutan suara) dan perbedaan wilayah. Pendapat beragam masyarakat diperoleh pada saat dilakukan penelitian dimana sebagian masyarakat menganggap faktor tersebut tidak berpengaruh bagi mereka dalam menggunakan hak pilih. Sedangkan masyarakat lainnya menganggap bahwa faktor perbedaan wilayah yang menghambat mereka untuk menggunakan hak pilih karena pada saat hari pemungutan suara, mereka berada diluar daerah dengan berbagai alasan.

Ketiga, faktor Psikologis. Dalam faktor ini, kedekatan terhadap calon, popularitas calon dan kinerja calon memberi pengaruh yang sangat signifikan bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh pasangan calon maupun KPU Kota Tebing Tinggi dianggap tidak terlalu berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah. Berkaitan dengan ideologi partai politik, masyarakat mengatakan bahwa mereka memilih dalam pemilihan umum tidak melihat dari partai politiknya, namun melihat sosok atau orang yang dicalonkan dan Keempat, faktor rasional. Dalam faktor ini, jenis pemilu sangat berperan meningkatkan partisipasi masyarakat. Umumnya, Pemilihan Legislatif memiliki angka partisipasi yang cukup tinggi. Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi sangat beragam. Sebagian masyarakat mengatakan bahwa ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah merupakan wujud dari kepedulian terhadap demokrasi di Indonesia. Masyarakat lainnya menganggap bahwa demokrasi itu tidak terlalu penting.

DAFTAR PUSTAKA

Bakaruddin Rosyidi Ahmad, dkk. 2016. Peta Partisipasi Pemilih Dan Sikap Terhadap Politik Uang (Vote Buying) Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Kabupaten Pesisir Selatan. Fisip, Unand,

Benny Geys, 2006. Explaining Voter Turnout: a Review of Aggregate-Level Research, dalam *Electoral Studies* 25.

Efriza, 2012. *Political Explore : Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.

Hadi, Krisno. 2006. *Indonesia Politik dan Pemerintahan*. Semarang : JPIP

KPU Kabupaten Tasikmalaya dan Program Studi Ilmu Politik Fisip, Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Survey Partisipasi Pemilih (Voter Turnout) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015.

Moleong, J Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nurhasim, Mochamad. 2014. *Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014: Sebuah Studi Penjajakan*. Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.

Sakah Saidu Mahmud. The 2015 General Elections: Voter Turnout, Voting Behavior and Democratic Consolidation in Nigeria. Paper prepared for presentation at the Post Election Conference The Electoral Institute, Abuja.

Seymour Martin Lipset. 2007. *Political Man : Basis Sosial Tentang Ilmu Politik*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Tia Subekti, 2014. *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013*. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

www.kpu.go.id

www.kpu-tebingtinggikota.go.id